



Pemkot Gagas Perwal Transportasi Wisata

JOGJA - Komitmen Pemkot Jogja menciptakan sistem tata kelola transportasi wisata diwujudkan dalam bentuk peraturan wali kota (perwal) tahun ini. Lahirnya perwal tersebut akan mengatur bus wisata yang masuk ke Jogja.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menjelaskan, keberadaan perwal tersebut masih dalam tahap penggodakan. Terbitnya produk hukum ini berupa perwal tersebut diharapkan mampu mengatur semua tata kelola transportasi wisata dengan memberikan ruang parkir yang memadai untuk bus wisata.

"Bus wisata tidak lagi diperbolehkan parkir di Alun-Alun Utara. Bahkan, parkir di pinggir jalan. Melainkan disediakan kawasan parkir di XT Square, Taman Parkir Ngabean, Taman Parkir Senopati, dan Taman Parkir Abu Bakar Ali," jelas Haryadi di ruang kerjanya di kompleks Balai Kota Jogja kemarin (1/4).

Pengelolaan akan melibatkan Satlantas dan Ditlantas Polda DIJ. Langkah ini diharapkan membuat aturan dalam perwal dapat dilakukan dengan maksimal.

Terkait isu lokasi parkir yang semakin terbatas saat libur panjang, pemkot akan mencari solusinya. Pemkot berniat merombak Taman Parkir Ngabean

menjadi dua lantai.

Haryadi berharap sistem transportasi wisata di Kota Jogja dapat lebih baik di masa depan dengan lahirnya perwal nanti. Menurutnya, pemkot tak hanya memberikan fasilitas parkir di empat titik lokasi yang sudah ada. Pemkot juga siap memberikan fasilitas bus penghubung. Bus penghubung itu membawa wisatawan dari lokasi parkir ke lokasi wisata.

Program ini akan diselaraskan dengan penataan kawasan Malioboro sebagai kawasan semipedestrian. Sejauh ini, menurut suami dari Tri Kirana Muslidatun tersebut, kegiatan *car free day* di malioboro pada Minggu pagi merupakan tahap uji coba penerapan kawasan semipedestrian.

Pemkot juga menyoroti layanan transportasi umum di Kota Jogja. Pemkot menilai fasilitas bus umum kurang memadai.

Berdasar kajian dari Dishub Kota Jogja, bus perkotaan yang ada saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar 45 persen. "Jika melihat *coverage*-nya sudah mencapai seratus persen diharapkan angka pengguna kendaraan pribadi bisa ditekan. Ini untuk mengurangi kepadatan," jelasnya. (hrp/amd/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005